



Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

RENSTRA 2021 - 2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis.

Sebagai Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Bontang yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang didalamnya memuat Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

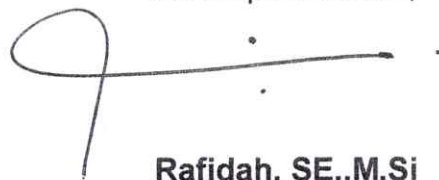
Rencana Strategis (Renstra) sendiri merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi

dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. Namun demikian, upaya tersebut tidaklah cukup. Pemahaman dan penyesuaian oleh seluruh pihak akan dokumen perencanaan ini masih merupakan keharusan agar Renstra ini dapat berfungsi dan bertumbuh sebagai dokumen yang hidup dalam menggerakkan kegiatan pengawasan menuju Tujuan Bapenda. Semoga visi tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk bekerja meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kota Bontang.

Bontang, November 2021

Plt. Kepala Badan,



Rafidah, SE., M.Si

NIP. 197003232001122003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi iii

Daftar Gambar v

Daftar Grafik vi

Daftar Tabel vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 17

2.3 Kinerja Pelayanan 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 27

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur..... 31

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 34

3.5 Penentuan isu-isu strategis 37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan..... 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6. 1 Rencana Program dan Kegiatan44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN50

BAB VIII PENUTUP52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi..... 16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan..... 17

Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Bapenda tahun 2021 19

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

Tabel 3.1 Analisis Gambaran pelayanan Bapenda..... 28

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD 30

Tabel 3.3 Capaian Indikator TPB pada Pilar Ekonomi Bapenda..... 36

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Pelayanan Bapenda 41

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 42

Tabel 6.1 Rencana program dan Kegiatan indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Bapenda 46

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan..... 50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan kerja keras jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang keberadaannya tersusun dalam Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Bontang yang telah ditetapkan.

Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain berkaitan dengan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang mengelola 11 (sebelas) jenis pajak daerah yakni:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir

10. BPHTB (Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan).

11. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian Operasional
4. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
5. Bidang PBB dan BPHTB, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB

Adapun uraian tugas Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan agar kegiatan berjalan dengan lancar;

- b. Menyusun sasaran program dan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan dalam rangka mencapai sasaran program rencana strategis;
- d. Mengkoordinasikan sasaran program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis agar kegiatan berjalan lancar;
- e. Membina bawahan sesuai peraturan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- f. Mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- g. Melaksanakan urusan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- h. Melaksanakan urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan peraturan perundangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- i. Melaksanakan urusan Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan Peraturan Perundangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- j. Mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana strategis sebagai bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Menyusun laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan program kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program Badan Pendapatan Daerah agar kegiatan berjalan lancar;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

d. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas;

e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

f. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor;

- g. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
 - h. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
 - i. Menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan program kerja Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional berdasarkan kebijakan dan sasaran program Badan Pendapatan Daerah agar kegiatan berjalan lancar;

- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional sesuai peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional secara berkala sesuai dengan peraturan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Menyelenggarakan urusan Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. Menyelenggarakan urusan Pembukuan dan Pengendalian Operasional dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

4. Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan program kerja Bidang Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan kebijakan dan sasaran program Badan Pendapatan Daerah agar kegiatan berjalan lancar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Pajak Daerah sesuai peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Pelayanan Pajak Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Menyelenggarakan urusan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

- g. Menyelenggarakan urusan penagihan dan keberatan pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Pelayanan Pajak Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

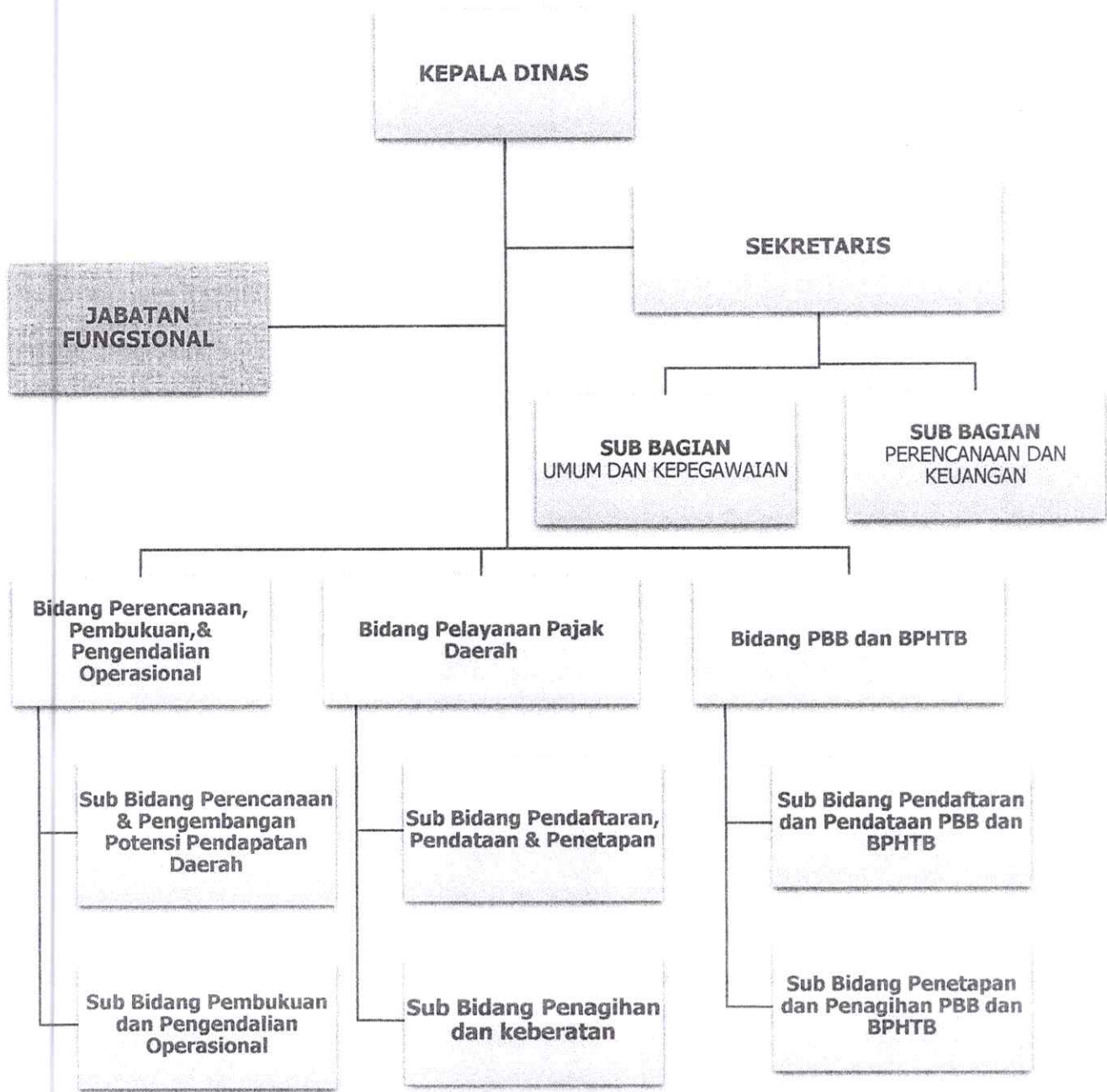
5. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan program kerja Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan kebijakan dan sasaran program Badan Pendapatan Daerah agar kegiatan berjalan lancar;

- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang PBB dan BPHTB sesuai peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang PBB dan BPHTB secara berkala sesuai dengan peraturan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Melaksanakan urusan Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. Melaksanakan urusan Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah Institusi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi komposisi aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebanyak 81 Orang, yang terdiri dari 13 Orang pejabat struktural, 26 Orang pegawai non struktural, 42 orang Non PNS Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

SDM	Pangkat/Gol Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH PEGAWAI
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3/ D2	SLTA	SLTP	SD	
PNS	6	17	15	1	27	12	4	16	3	16	-	-	39
Non PNS	-	-	-	-	20	22	1	20	1	20	-	-	42
JUMLAH													81

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Daerah untuk pemenuhan pembiayaan daerah. Komposisi jumlah pegawai Bapenda saat ini belum sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil evaluasi dari BPK dan BPKP, masih diperlukan 15 (lima belas) jabatan fungsional tertentu. Selain itu diperlukan tambahan sebanyak

15 (lima belas) petugas lapangan untuk ditempatkan di setiap Kelurahan sebagai petugas pajak daerah.

Jenis jabatan fungsional tertentu yang belum terisi adalah sebagai berikut :

1. Analis tata usaha
2. Analis produk hukum
3. Analis penagihan pajak
4. Analis kebijakan pajak dan retribusi
5. Analis pajak/retribusi daerah
6. Analis penagihan dan pengembalian
7. Pengelola pendapatan
8. Pengelola teknik informasi
9. Pengelola data, penyuluhan dan layanan informasi
10. Pengelola monitoring dan evaluasi
11. Analis pemeriksa pajak
12. Pengelola penagihan dan pengawasan
13. Pengelola data pemeriksa pajak
14. Pengelola data keberatan dan banding
15. Pengelola data pendataan, pemetaan dan penilaian

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

- a. Kantor (Gedung)

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terletak di Jln. M. H. Thamrin No.15 Bontang.

b. Sarana Peralatan dan Mesin

Tabel 2.2
Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Alat-alat angkutan	33	Baik
2	Alat bengkel dan alat ukur	21	Baik
3	Alat kantor dan alat rumah tangga	440	Baik
4	Alat studio dan komunikasi	17	Baik
	Jumlah	511	

Untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang saat ini masih diperlukan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai berupa meubelair dan kendaraan operasional lapangan.

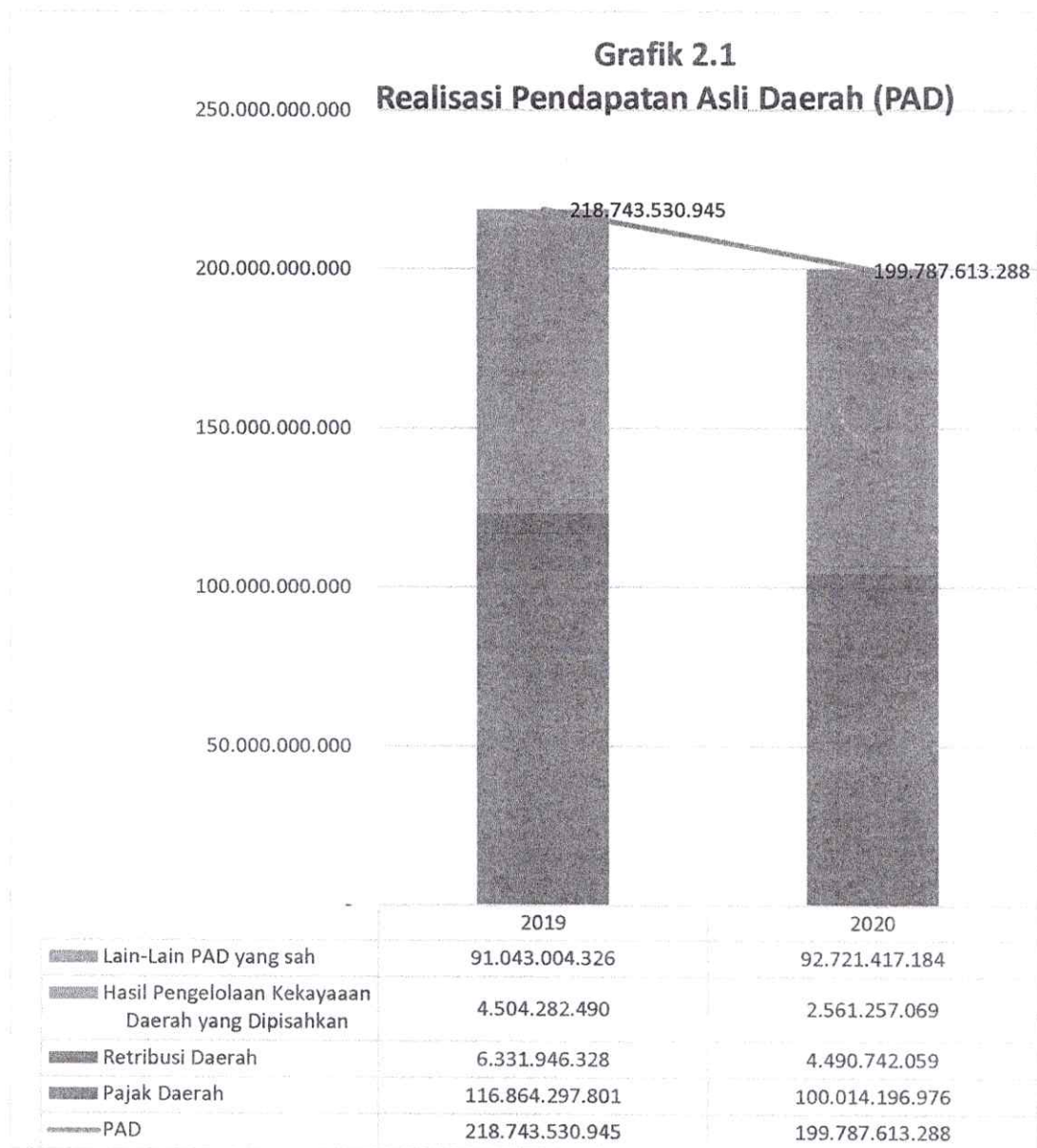
2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang utama berkaitan dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan dan Penerimaan Daerah khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kota Bontang.

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKD	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9%	9,5%	9,6%	9,65%	-8,66%	-	107,2%	91,15%	-



Dilihat dari table 2.3 dan grafik 2.1 diatas kinerja pelayanan sesuai dengan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang periode 2019 – 2021 menunjukan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp.18.955.917.657 atau -8,66%. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya :

1. Adanya Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 lalu yang mengakibatkan menurunnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari sejumlah sektor yang ada di Kota Bontang
2. Adanya refocusing anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Target murni Pendapatan Asli Daerah yang semula mencapai Rp.184.961.313.500,00 dengan rincian sebesar Rp.112.418.884.368,00 dari Hasil Pajak Daerah, Rp.4.089.250.000,00 dari Hasil Retribusi Daerah, Rp.5.098.465.632,00 dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Rp.63.354.713.500,00 dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target Pendapatan Asli Daerah berubah menjadi Rp.163.884.340.757,00 dengan rincian sebesar Rp.92.977.611.625,00 dari Hasil Pajak Daerah, Rp.2.453.550.000 dari Hasil Retribusi Daerah, Rp.5.098.465.632,00 dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rp.63.354.713.500,00 dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.163.884.340.757,00 menjadi Rp. 187.706.530.331,10 atau mengalami peningkatan sebesar 14,54% dengan rincian sebesar Rp. 95.978.011.625,00 dari Hasil Pajak Daerah, Rp.4.083.500.000,00 dari Hasil Retribusi Daerah, Rp.2.561.257.068,55 dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rp.85.083.761.637,55 dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4. Menurunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan karena komposisi saham Pemerintah Kota Bontang di Bank Kaltimara hanya sebesar 1,95 % sehingga deviden yang diperoleh menurun sebesar Rp.1.942.742.911,45. Yang semula di tahun 2019 Rp.4.504.000.000 menjadi Rp.2.561.257.088,55 di tahun 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan - permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya daerah. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi - kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing - masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

• Kekuatan (Strength)

- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- Adanya Produk Hukum berupa Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bontang, sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang system administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah;
- Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang sesuai dengan analisis jabatan, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
- Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud.

- Tersedianya gedung yang representative dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.
- **Kelemahan (Weakness) :**
 - Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita, dengan kondisi jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.
 - Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Perwali maupun Keputusan Walikota sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
 - Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku;
 - Masih terdapat potensi Pendapatan yang cukup besar, namun belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (Opportunity):**
 - Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya beberapa Pajak Pusat dan Pajak Provinsi diantaranya BPHTB, PBB Sektor

Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Air Tanah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

- Letak geografis Kota Bontang cukup strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata dan sebagai daerah industri berbasis kondensat yang memiliki banyak perusahaan multinasional, dapat memberikan efek peningkatan Pendapatan Daerah;
- Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kota Bontang;
- Kondisi sosial di Kota Bontang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Bontang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Bontang akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

- **Ancaman (Threat):**

- Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah;
- Kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan penurunan pembayaran Pajak Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan sangat berperan untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Namun tentu saja dalam mencapai kondisi ideal seperti yang diharapkan memerlukan proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan yang terukur, sehingga yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah hasil analisis gambaran pelayanan SKPD. Analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1
Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terbatasnya aparatur yang berkompetensi	• UU No.33 Tahun 2004 • UU No.28 Tahun 2009 • PP No.55 Tahun 2005 • PP No.55 Tahun 2016 • Permendagr i No.13 Tahun 2006 • Perda Kota Bontang No.9 Tahun 2010	• Ketepatan analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan analisa kebutuhan aparatur	• Kebijakan penempatan pegawai kurang memperhatikan kebutuhan dan kompetensi aparatur	• Kurang maksimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan
	Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum valid		• Ketersediaan aparatur yang kompeten • Ketersediaan Sistem Informasi (aplikasi)	• Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan	• Belum sempurnanya database yang dapat digunakan sebagai data perencanaan dan peningkatan PAD
	Sistem Informasi (aplikasi) pendapatan daerah belum sepenuhnya terintegrasi		• Keterbatasan penganggaran dan informasi terkait aplikasi • Kemampuan aparatur belum mampu membuat sistem informasi yang terintegrasi	• Terbatasnya penyedia aplikasi yang mampu membuat integrasi Sistem Informasi	• Kurang maksimalnya informasi dan pelayanan publik dalam bentuk digital /teknologi
	Regulasi sistem dan prosedur pemungutan PAD masih belum lengkap		• Kemampuan aparatur dalam penyusunan regulasi • Keterbatasan informasi perubahan regulasi	• Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi • Waktu pembahasan dan fasilitasi regulasi terbatas	• Kurang maksimalnya pemungutan PAD
	Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Dana Transfer		• Kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan PAD • Terbatasnya kemampuan menagih sektor PAD	• Selisih Penetapan alokasi dengan realisasi • Penyaluran Dana Transfer sangat tergantung kondisi perekonomian	• Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kota Bontang yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 adalah : " Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab ".

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang (RPJMD) Tahun 2021-2026 dimuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang (RPJPD) Tahun 2015 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang (RPJMD) juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Badan Pendapatan Daerah terkait erat dengan Misi 1, yaitu: *"Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan."*

Untuk menyelaraskan antara tupoksi Badan Pendapatan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 maka program yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2016 adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi : Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan	Kurang optimalnya peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu	Adanya dukungan politik yang kuat terhadap pelaksanaan tugas dan jalannya pemerintahan sehingga diharapkan akan memberikan dampak peningkatan pendapatan pajak daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kurang sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Pajak daerah	Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pendapatan pajak daerah
		Beberapa sistem informasi/aplikasi yang ada masih belum sepenuhnya terintegrasi sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.	Anggaran operasional yang memadai untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan pelayanan
		Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal.	Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.
		Rendahnya kesadaran dan kejujuran wajib	Masih ada potensi objek pajak daerah yang belum tergali

		pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan	untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.
		Pendapatan pajak daerah sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global	Penetapan pembaruan regulasi sebagai dasar pemungutan pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah
		Koordinasi yang kurang maksimal, baik di internal perangkat daerah maupun antar perangkat daerah sering membuat terhambatnya pelaksanaan kegiatan	

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- 2. Penerimaan negara yang optimal
- 3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
- 4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
- 5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

- 1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Dalam arah kebijakan Renstra Bapenda Kota Bontang terdapat faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Bapenda ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah. Berikut faktor-faktor yang dirasa dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Bapenda.

▪ **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang dimungkinkan dapat menghambat permasalahan pelayanan Bapenda ditinjau dari Renstra Kementerian Keuangan adalah:

- a. Adanya pembatasan oleh Undang-Undang perpajakan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah;
- b. Kurang optimalnya koordinasi, konsultasi, konfirmasi dan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan terkait, khususnya tentang transfer dana ke daerah;
- c. Adanya kecenderungan penurunan produksi dan harga Sumber Daya Alam;
- d. Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Perda yg mendorong timbulnya biaya tinggi dan menghambat investasi di daerah;
- e. Sumber pendanaan daerah terlalu bertumpu pada alokasi pusat berupa transfer (Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian).

▪ **Faktor Pendorong**

Sedangkan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mendorong penyelesaian permasalahan pelayanan Bapenda ditinjau dari Renstra Kementerian Keuangan antara lain :

- a. Secara intensif melakukan koordinasi, konsolidasi dan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan;
- b. Adanya pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- c. Penambahan alokasi DAU sebagai dasar pembiayaan minimal untuk kebutuhan belanja pegawai.

Berdasarkan renstra Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

menetapkan tujuan sebagai berikut : “ **Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah**” dengan Indikator Persentase Capaian Target Pendapatan.

Dari uraian di atas korelasi antara Renstra Bapenda Kota Bontang dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dari sisi Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yaitu **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara tupoksi dan struktural birokrasi dalam sistem pemerintahan, Bapenda Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi dan Kementerian Keuangan. Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Sedangkan RPJMD Kota Bontang berpedoman pada RPJPD Kota Bontang, RTRW dan RPJM Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan RPJM Nasional. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Bapenda sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 46/2016 tentang Penyelenggaraan KLHS).

Berdasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup.

KLHS perlu dibuat agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pembangunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah Rencana, dan/atau Program.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia memiliki 17 tujuan dan 169 target, dengan jumlah indikator sebanyak 319 indikator meliputi 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Dari hasil analisis dari 222 indikator TPB, sebanyak 211 indikator datanya berada dan menjadi kewenangan Perangkat Daerah (PD) Kota Bontang. Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terdapat pada Tujuan 17 “**Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan**” dengan dua indikator, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator TPB pada Pilar Ekonomi
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

TPB	Indikator	Capaian	Target							Ketercapaian
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	7,50	10,77	10,77	10,96	11,16	11,35	11,55	11,76	Sudah dilaksanakan dan sudah tercapai
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan dan belum tercapai

Melihat hasil capaian TPB untuk indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Kota Bontang masih belum mencapai target nasional yaitu 12%. Kemudian dilihat dari proyeksi hasil capaian sampai dengan tahun 2030 terus mengalami penurunan sehingga diperlukan upaya tambahan guna tercapainya target nasional.

Pemerintah Kota Bontang tentunya perlu melaksanakan program-program dan rencana kegiatan guna meningkatkan hasil capaian melalui Badan Pendapatan Daerah selaku badan daerah yang memiliki tanggung jawab. Beberapa program dan kegiatan terdapat juga di dalam Permendagri

No.90 Tahun 2019 diantaranya yaitu Program pengelolaan pendapatan daerah melalui program Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Program dan kegiatan tersebut tentunya dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bontang dan khususnya Badan Pendapatan Daerah selaku yang badan yang bertanggung jawab.

Terkait dengan pilar ekonomi ini banyak faktor yang mempengaruhi target capaian indikaor TPB. Beberapa yang mempengaruhi pilar ekonomi terkait pendapatan daerah Kota Bontang adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi menurun;
2. Sumbangan sektor migas menurun;
3. Efek berganda lainnya (yang dipengaruhi oleh harga dunia, pandemic, investasi);
4. Pengangguran;
5. Peran sektor pariwisata, pajak, manufaktur, pertanian, UMKM, dll;
6. Jaminan sosial tenaga kerja. Beberapa faktor ini tidak dapat langsung diatasi karena lintas provinsi, lintas kabupaten dan bahkan nasional. Termasuk kewenangan keuangan dan pengelolaan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat

Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain :

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis perangkat daerah yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/program prioritas perangkat daerah juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara perangkat daerah dengan program-program Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis penentuan isu-isu strategis, maka dirumuskan isu-isu utama yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah pada periode 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Fiskal Kota Bontang masih rendah karena sangat tergantung dengan Pendapatan Transfer;
2. Basis data potensi Pendapatan Pajak Daerah belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Adanya perubahan peraturan perundangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat terkait Pendapatan Daerah.

4. Bapenda merupakan Perangkat Daerah yang masih memerlukan sarana prasarana, manajemen organisasi dan aparatur yang kuat;
5. Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum seluruhnya terintegrasi.
6. Penegakan sanksi hukum belum dilaksanakan secara optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kemandirian Fiskal Pembangunan Daerah” dengan target indikator “Kategori Kapasitas Fiskal”.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator :
 - Persentase Peningkatann Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Kategori Kapasitas Fiskal	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,6	3,23	3,29	3,29	3,53	3,96
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bapenda menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	• Meningkatkan penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur pemungutan PAD dengan memaksimalkan sumber potensi baru • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, dan instansi terkait lainnya. • Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak	• Membuat regulasi yang komprehensif berdasarkan kajian potensi untuk memaksimalkan sumber potensi baru yang dapat meningkatkan PAD • Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penggalan serta monitoring Pendapatan Asli Daerah • Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah

		• Melaksanakan optimalisasi sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan • Melakukan pengembangan dan penyederhaan system prosedur • Melakukan pengembangan infrastruktur • Melakukan pengembangan budaya atau kultur	• Melaksanakan optimalisasi sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak • Membuat system prosedur yang mengatur secara detail tahapan pelayanan agar system pelayanan tidak menjadi berbelit-belit, kaku, dan tidak efektif • Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan agar lebih aman dan nyaman • Meningkatkan kualitas SDM aparatur agar pegawai memiliki perilaku yang berpedoman pada nilai, norma, aturan, kode etik, maupun budaya yang harus ditaati
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diwujudkan dalam kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program,

merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indukatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sesuai tabel 6.1 berikut

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif
Tabel 6.1
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2025

[illegible]

Renstra Bapenda Kota Bontang 2021-2026

Tahun	Sumber	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Prinsip dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kersangka Pemanduan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Kategori	Rp.	Kategori	Rp.	Kategori	Rp.	Kategori	Rp.	Kategori	Rp.	Kategori	Rp.	Kategori	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	69.350.000	7 orang	71.430.500	8 orang	84.913.500	9 orang	86.404.850	10 orang	106.862.333	10 orang	116.459.869	49 orang	544.794.054	BAFENDA	Kota Bontang		
				Administrasi umum perangkat daerah	Output : Jumlah Bulan	12 bulan	603.230.939	12 bulan	622.777.283	12 bulan	683.073.461	12 bulan	772.666.116	12 bulan	822.604.592	12 bulan	944.730.638	12 bulan	4.448.863.049	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peralangan Bangunan Kantor	Output : Jenis Pengadaan	4 item	24.301.414	4 item	24.301.414	4 item	24.301.414	4 item	24.301.414	4 item	24.301.414	4 item	24.301.414	4 item	145.808.484	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	147.419.319	9 jenis	147.263.319	9 jenis	161.989.870	9 jenis	179.188.857	9 jenis	197.107.743	9 jenis	237.420.610	9 jenis	1.970.390.118	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah bulan logistik/sembako	10 item	51.511.965	10 item	49.932.240	10 item	62.329.478	10 item	69.792.426	10 item	75.418.669	10 item	82.960.336	10 item	391.945.844	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Output : Jumlah jenis penyediaan cetakan dan pengandaan	7 item	33.100.041	7 item	42.192.810	7 item	46.412.091	7 item	52.033.300	7 item	57.238.630	7 item	82.518.148	7 item	336.335.020	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundangan-undangan	Output : Jumlah bahan bacaan dan peralatan perundangan-undangan	1.209 exemplar	8.400.000	1.250 exemplar	8.750.600	1.300 exemplar	9.100.000	1.350 exemplar	9.450.000	1.400 exemplar	9.800.000	1.450 exemplar	10.150.000	8700 exemplar	55.650.000	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	44 kali	316.488.000	48 kali	350.336.800	52 kali	378.946.608	57 kali	437.880.119	62 kali	458.518.136	68 kali	504.369.950	331 kali	2.448.533.613	BAFENDA	Kota Bontang		
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Output : Jumlah pengadaan mobilair	1 item	7.631.002	2 item	10.392.202	3 item	17.992.803	3 item	23.992.803	3 item	27.432.591	3 item	28.788.420	3 item	116.339.801	BAFENDA	Kota Bontang		
				Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah pengadaan meubelair	1 item	7.631.002	2 item	10.392.202	3 item	17.992.803	3 item	23.992.803	3 item	27.432.591	3 item	28.788.420	3 item	116.339.801	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Output : Jumlah bulan	12 bulan	2.465.622.000	12 bulan	1.964.792.876	12 bulan	2.086.566.427	12 bulan	2.193.386.636	12 bulan	2.132.587.597	12 bulan	2.372.386.024	12 bulan	13.215.641.546	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah material dan jasa pengiriman	600 lembar	6.000.000	700 lembar	7.000.000	800 lembar	8.000.000	800 lembar	8.000.000	800 lembar	8.000.000	800 lembar	8.000.000	4500 lembar	45.000.000	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah tagihan listrik, air dan internet	12 bulan	332.910.000	12 bulan	257.678.156	12 bulan	281.443.971	12 bulan	311.796.560	12 bulan	342.965.623	12 bulan	377.266.588	12 bulan	1.926.000.998	BAFENDA	Kota Bontang		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Output : Jumlah non pus dan tenaga keberhasilan	55 orang	2.106.712.000	55 orang	1.700.114.720	55 orang	1.793.110.456	55 orang	1.874.096.036	55 orang	1.781.617.968	55 orang	1.987.119.436	282 orang	11.244.780.638	BAFENDA	Kota Bontang		

Renstra Bapenda Kota Bontang 2021-2026

Tajuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2021			2022			2023			2024					2025		
						Kinerja	Rp.	Spesifikasi	Kinerja	Rp.	Spesifikasi	Kinerja	Rp.	Spesifikasi	Kinerja	Rp.	Spesifikasi			Kinerja	Rp.	Spesifikasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Bulan	12 bulan	357.092.750	12 bulan	309.991.266	12 bulan	318.362.416	12 bulan	366.772.524	12 bulan	404.349.776	12 bulan	442.584.753	12 bulan	2.220.094.537	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah unit kendaraan	33 unit	293.133.750	33 unit	260.313.266	33 unit	279.122.685	33 unit	297.078.819	33 unit	327.788.701	33 unit	359.463.371	33 unit	1.816.909.612	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah pendakim gedung yang dipelihara	5 jenis	54.610.000	5 jenis	33.263.074	5 jenis	35.924.227	5 jenis	39.918.849	5 jenis	43.910.734	5 jenis	48.301.807	5 jenis	215.970.691	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	9.350.000	1 gedung	16.355.006	1 gedung	21.313.506	1 gedung	26.774.456	1 gedung	32.652.241	1 gedung	35.817.525	1 gedung	14.241.294	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Persentase Capaian PAID	4,68%	3.393.814.514	100%	2.864.962.875	100%	2.541.828.185	100%	2.748.411.722	100%	2.795.423.956	100%	2.851.352.446	100%	17.587.172.686	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Bulan	12 bulan	3.393.814.514	12 bulan	2.864.962.875	12 bulan	2.541.828.185	12 bulan	2.748.411.722	12 bulan	2.795.423.956	12 bulan	2.851.352.446	12 bulan	17.587.172.686	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	355.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3	3	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	355.000.000	6 Laporan	170.000.000	7 Laporan	170.000.000	7 Laporan	170.000.000	7 Laporan	170.000.000	7 Laporan	170.000.000	7	7	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah sama dan persentase pengelolaan pajak daerah	6 sama dan persentase	353.610.944	6 sama dan persentase	308.077.521	6 sama dan persentase	309.913.414	6 sama dan persentase	281.168.285	6 sama dan persentase	280.595.525	6 sama dan persentase	296.575.450	6	6	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Laporan	663.185.000	4 Laporan	437.851.677	4 Laporan	449.549.591	4 Laporan	417.739.696	4 Laporan	428.640.960	4 Laporan	437.759.696	4	4	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Laporan Permasalahan yang telah diidentifikasi dan belum diidentifikasi	2 Laporan	66.642.000	2 Laporan	73.786.980	2 Laporan	74.758.032	2 Laporan	62.622.873	2 Laporan	70.453.192	2 Laporan	73.440.117	10	10	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Dokumen yang telah dilakukan verifikasi data pelaporan pajak daerah	2 Dokumen	455.206.671	2 Dokumen	409.667.346	2 Dokumen	411.503.241	2 Dokumen	382.738.032	2 Dokumen	390.588.351	2 Dokumen	398.272.277	8	8	BAFENDIA	Kota Bojonegara	
				Pembelajaran Berbasis Muatan Lokal	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	1 Dokumen	244.602.799	1 Dokumen	179.415.880	1 Dokumen	207.280.569	1 Dokumen	178.313.160	1 Dokumen	186.265.479	1 Dokumen	194.352.405	3	3	BAFENDIA	Kota Bojonegara	

Renstra Bapenda Kota Bontang 2021-2026

Tahun	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Ajaran												Tipe Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Pemungut Jarak	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target		Rp.									
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.												
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan													
					Output : Jumlah Wajib Pajak yang Tervalidasi	2.000 WP	702.121.769	2.000 WP	787.682.233	2.000 WP	789.518.147	2.000 WP	742.027.750	2.000 WP	749.858.049	2.000 WP	757.844.975	12.000 WP	4.539.152.925	BAKENDIA	Kota Bontang								
					Output : Jumlah Dokumen teragihnya WP yang memiliki piutang pajak	1 Dokumen		1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	5	160.000.000	BAKENDIA	Kota Bontang								
					Output : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	328.351.231	1 Dokumen	266.476.314	1 Dokumen	297.104.989	1 Dokumen	275.740.116	1 Dokumen	278.519.400	1 Dokumen	290.374.606	5	1.734.766.656	BAKENDIA	Kota Bontang								
					Output : Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Ketidakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		10 Laporan											

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketata laksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang periode 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kendali dan bahan evaluasi dalam pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Pendapatan Kota Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,6	3,23	3,29	3,30	3,52	3,96	3,96
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83	83

BAB VIII

PENUTUP

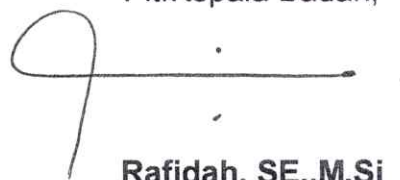
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, saran dan tujuan bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan bidang keuangan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya "Tata Pemerintahan yang baik dan Bersih (Good Governance And Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi".

Bontang, November 2021

Plt. Kepala Badan,



Rafidah, SE., M.Si

NIP. 197003232001122003